



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERBAIKAN RUMAH DI  
PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PENATAAN KAMPUNG DI DKI  
JAKARTA PADA TAHUN 2013  
(STUDI KASUS: KAMPUNG DERET PETOGOGAN)**

**JJURNAL**

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Strata 1**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Purwati Rahayu Edarsasi**

**14010112140027**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

**IMPLEMENTATION OF HOUSE ENHANCEMENT POLICY IN  
INHABITABLE SETTLEMENT THROUGH VILLAGE STRUCTURING  
AT DKI JAKARTA IN 2013  
(A CASE STUDY AT KAMPUNG DERET PETOGOGAN)**

**PURWATI RAHAYU EDARSASI  
(GOVERNMENT SCIENCE OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE  
FACULTY, DIPONEGORO UNIVERSITY, SEMARANG)**

**ABSTRACT**

The implementation of house enhancement policy in inhabitable settlement through village structuring at DKI in 2013 (a case study at kampung deret Petogogan) was aimed to find out how a policy is implemented at DKI Jakarta, and how local society's participation an to changing their house areas healthier, more well-structured and more habitable.

The research methodology was qualitative. The data collection came from primary and secondary data. Research subjects were the Department of Housing and Building of DKI Jakarta Province, the Department of Housing and Building of South Jakarta, and Petogogan inhabitants. Tecnique of collecting data, by interview and documentation.

The inhabitable is one of the social problems that is difficult to be solved. Building an inhabitable settlement called as slum area can cause a potential problem in the city. The implementation of house enhancement policy in inhabitable settlement through village structuring at DKI Jakarta is one of the outstanding programs planned and socialized by the government of DKI Jakarta. The target village operates the concept of changing regions into one unified region. It is different from the slum reduction programs initiated by the previous governor of Jakarta, the policy involved the community during implementation. Therefore, inhabitants participation is greatly influency of success of the implementation.

Key words : Inhabitable Settlement, Policy of Implementation of Enhancement Fund, and Village Structuring

## 1. Pendahuluan

Setiap wilayah atau daerah di dunia pasti memiliki permasalahan, baik permasalahan ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya. Permasalahan terjadi tidak hanya secara nasional namun juga regional. Permasalahan yang terjadi apabila dibiarkan akan semakin kompleks dan dapat merambat ke permasalahan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Persoalan tempat tinggal merupakan masalah yang serius yang dapat menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah untuk menangani dan mengawasinya. Di kota-kota besar, persoalan tempat tinggal bukan lagi hal yang asing. Terbatasnya lahan sementara kebutuhan akan tempat tinggal sangat tinggi, mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan sosial baru.

DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia dan merupakan kota dengan penduduk paling padat di Indonesia. Pada sensus penduduk tahun 2010 Jumlah penduduk Kota Jakarta sudah mencapai 9,6 juta orang. Jumlah tersebut dapat diuraikan dari beberapa kota yang ada di Jakarta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hessel Nogi S Tangkilisan. *“Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 2

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta diakses dari <http://Jakarta.bps.go.id/index> pada tanggal 30 Oktober 2014 Pukul 19:15

Tabel 1.1  
Jumlah penduduk di DKI Jakarta

NO	Kabupaten / Kota	Jumlah		Jumlah penduduk
		Perempuan	Laki-Laki	
1	Kepulauan seribu	10.711	10.371	21.082
2	Jakarta Selatan	1.043.675	1.018.557	2.062.232
3	Jakarta Timur	1.372.300	1.321.569	2.693.896
4	Jakarta Pusat	453.591	445.924	899.515
5	Jakarta Barat	1.164.446	1.117.499	2.281.945
6	Jakarta Utara	824.480	821.179	1.645.659
Total Jumlah Penduduk		4.869.203	4.735.126	9.604.329

Banyaknya jumlah penduduk DKI Jakarta tidak sebanding dengan luas DKI Jakarta. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari daratan seluas 662,33 km<sup>2</sup> termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu dan lautan seluas 6.977,5 km<sup>2</sup>. Itu artinya dalam luas wilayah di Jakarta, setiap satu kilomernya ditempati sekitar 15,432.85 jiwa. Padahal menurut kepala BPS provinsi Jawa Barat, batas ideal kepadatan penduduk dalam setiap satu kilometer persegi ditempati oleh 1.000 orang atau 40 orang per hektar. Kepadatan penduduk yang diluar batas ideal ini menyebabkan minimnya ketersediaan lahan untuk membangun tempat tinggal yang pada akhirnya menyebabkan munculnya pemukiman-

---

permukiman kumuh yang berdiri di Jakarta baik secara legal maupun secara ilegal.

Kebijakan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui kampung deret di DKI Jakarta atau biasa dikenal dengan kampung deret merupakan salah satu program unggulan yang telah dirancang dan disosialisasikan sebelum Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. kampung deret memiliki konsep membedah suatu kawasan menjadi satu wilayah terpadu. Dengan konsep ini, permukiman warga dipindahkan ke kampung deret, sedangkan lahan sisanya dipergunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, puskesmas, pasar, hingga waduk dan jalur hijau untuk menyerap air.

Kampung deret direncanakan akan dibangun pada dua tahap. Tahap pertama, kampung deret akan di bangun di 27 lokasi di DKI Jakarta. sementara pada tahap kedua, kampung deret akan di bangun di 70 lokasi di DKI Jakarta. Salah satu lokasi pembangunan kampung deret berada di RW.05, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Perkampungan yang dulu kumuh dan sebagian besar bangunannya semi permanen kini berubah menjadi bangunan berdinding batu bata, dengan desain rumah yang sama. Di sekitar permukiman yang dijadikan kampung deret itu dibuat juga sebuah taman tempat bersosialisasi bagi warga dan anak-

anak di Petogogan. Di taman itu dipasang semacam mainan anak dan ayunan.<sup>3</sup>

Pembangunan kampung deret mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat maupun pemerintah. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa kebijakan kampung deret berhasil menjadikan pemukiman kumuh menjadi tempat tinggal yang layak untuk di tempati. Keberhasilan pembangunan kampung deret yang di klaim masyarakat ternyata menimbulkan suatu masalah, seperti ada ketidakadilan yang diterima oleh warga Jakarta yang terkena dampak pembuatan kampung deret hingga kesalahan pembangunan kampung deret yang tidak berada pada lahan yang tepat.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Teori**

Pada penelitian implementasi kebijakan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui kampung deret di DKI Jakarta pada tahun 2013, Studi kasus kampung deret Petogogan ini fokus penelitian berada pada implementasi kebijakan kampung deret dan partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan kampung deret. Menurut Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi

---

<sup>3</sup> Siti Ruqoyah dan Rohimat Nurbaya, petogogan jadi contoh kampung deret di DKI Jakarta <http://metro.news.viva.co.id/news/read/493988-petogogan--jadi-contoh-kampung-deret-di-jakarta>, pada tanggal 14 Januari 2016.

memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).<sup>4</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam Implementasi kebijakan kampung deret ini adalah top-down dan bottom-up. Menurut Hogwood dan Gunn, Pendekatan *top-down* melihat proses implementasi sebagai sebuah proses yang ditentukan dari atas, berjalan secara konsekual dalam tahap-tahap yang sudah ditentukan. Kebalikan dari pendekatan *top-down*, pendekatan *bottom-up* melihat proses implementasi sebagai sebuah proses yang inisiatif dan prakteknya dibangun dari bawah.

Digunakannya metode pendekatan *bottom-up* menyebabkan terjadinya partisipasi dari masyarakat dalam proses implementasi kebijakan kampung deret. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Agus Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi kebijakan publik (konsep dan implikasinya di Indonesia)*, Yogyakarta:Gava Media, 2012, hlm. 20

upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.<sup>5</sup>

Pada implementasi kebijakan kampung deret di Petogogan, masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaannya. Pada dasarnya pemerintah hanya sebagai fasilitator, sedangkan dalam proses implementasi, segala hal yang menyangkut pembangunan kampung deret ditentukan oleh masyarakat kampung deret Petogogan bersama dengan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

## **2.2 Metoda**

Pada Penelitian tentang implementasi kebijakan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui kampung deret di DKI Jakarta pada tahun 2013 di DKI Jakarta pada tahun 2013 dengan studi kasus di kampung deret Petogogan, menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di kampung deret Petogogan, Jakarta Selatan.

Subjek penelitian adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Selatan dan warga kampung deret Petogogan, Jakarta Selatan. Selain subjek penelitian yang juga merupakan sumber data primer, peneliti juga mengambil sumber data sekunder dari kutipan sumber lainnya seperti

---

<sup>5</sup> Isbandi Rukminto Adi, *perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*, Depok: Fisip UI Press, 2007, hlm 27



buku, dokumen pribadi, arsip dan sumber data tertulis lainnya. Dalam teknis pelaksanaan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan dua metode untuk mendapatkan informasi yang jelas. Metode tersebut diantaranya wawancara atau *interview* dan dokumentasi.

Data yang sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisa data yang sudah terkumpul. Teknik menganalisa data yang di kemukakan oleh Miles Huberman mencakup tiga kegiatan bersama antara lain, mereduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar di lapangan. kemudian Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan dan terakhir menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin

### **3. Hasil Penelitian**

#### **3.1 Kebijakan Kampung Deret dalam penanganan Permukiman Kumuh di DKI Jakarta**

Kampung deret merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah DKI Jakarta yaitu Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam memperbaiki rumah di permukiman kumuh melalui penataan kampung. Kampung deret di atur

dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 64 tahun 2013 tentang bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui penataan kampung.

Ada tiga regulasi yang mengatur tentang pembangunan kampung deret, yaitu:

1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1592 tahun 2013 tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial untuk perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui penataan kampung tahun anggaran 2013.
2. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 171/2013 tentang Tim Evaluasi Bantuan Perbaikan di Permukiman Kumuh melalui Penataan Kampung.
3. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 2963/-1.796.2, Tanggal 26 Juli 2013. Petunjuk teknis bantuan perbaikan di permukiman kumuh melalui penataan kampung.

Kampung deret dilaksanakan setelah pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dilantik. Pada saat itu belum ada peraturan apapun untuk mengatur program kampung deret. Gubernur Joko Widodo langsung memerintahkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI

Jakarta dan pemerintah kota dan jajarannya untuk menyusun dan mensurvei segala sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan rumah.

Pelaksanaan pembangunan kampung deret pada tahun 2013 terdiri dari dua konsep, yaitu :

1. Konsep Bedah Rumah

Pada konsep ini bantuan dimanfaatkan warga untuk perbaikan rumah. Rumah yang diperbaiki disyaratkan mundur satu meter dari posisi letak awal agar jalan kampung lebih lebar.

2. Konsep Penataan Kampung

Pada konsep ini bantuan dimanfaatkan warga untuk penataan kampung, rumah bukan diperbaiki, tetapi dibangun baru dengan penataan yang lebih komprehensif,

Kampung deret Petogogan merupakan satu-satunya kampung deret di DKI Jakarta yang menerapkan penataan kampung. Seluruh rumah diPetogogan dihancurkan kemudian dibangun kembali menggunakan Konstruksi risha (rumah instan sehat). Risha merupakan rumah dengan konsep knock down, di mana proses pembangunannya tidak membutuhkan semen dan bata, melainkan dengan menggabungkan panel - panel beton dengan baut.

## **3.2 Implementasi Kampung Deret di Petogogan**

### **3.2.1 Proses Implementasi Kebijakan Kampung Deret di Wilayah Petogogan.**

Kampung deret merupakan contoh dari kebijakan yang menggunakan kombinasi dari dua pendekatan yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *top down* melihat dari proses pembuatan regulasi, dimana segala prosedur dan petunjuk yang tercantum di peraturan gubernur dibuat oleh pemerintahan provinsi DKI Jakarta sambil berjalannya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta ke seluruh kabupaten dan kota di DKI Jakarta. Sedangkan pendekatan *bottom-up* dilihat dari segala proses pengimplementasian kebijakan kampung deret didasarkan oleh proses tawar menawar antara masyarakat dengan pemerintah, dan proses pembangunan dilakukan atas dasar warga yang menjadi penerima bantuan perbaikan rumah.

Dalam implementasi kebijakan kampung deret, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta berperan penting terhadap pelaksanaan kebijakan kampung deret mulai dari tahap pembuatan peraturan gubernur, sosialisasi, pengusulan anggaran ke BPKAD, pengawasan hingga pelaporan. Namun Dinas Perumahan dan Gedung tidak bekerja sendiri, ada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang ikut membantu dalam pelaksanaan.

Sebelum Surat Keputusan Gubernur mengenai Bantuan Sosial untuk Perbaikan Rumah di Pemukiman Kumuh melalui

Penataan Kampung dibuat, daerah melalui tim evaluasi mencari kawasan-kawasan kumuh yang layak untuk ditata melalui program kampung deret atau warga yang mengusulkan tempat tinggalnya untuk ikut program penataan kampung. Setelah menemukan calon penerima bantuan sosial penataan kampung dan memverifikasinya, walikota disetiap wilayah di DKI Jakarta termasuk Jakarta Selatan mengajukan usulan kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk direkapitulasi dan kemudian diusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk dijadikan Surat Keputusan Gubernur. Setelah data hasil evaluasi diterima oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari tim evaluasi, mereka langsung melakukan sosialisasi ke wilayah-wilayah yang akan menjadi proyek pembangunan kampung deret.

Setelah terjadi kesepakatan antara Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, dibentuklah kelompok masyarakat yang diinisiasi oleh warga kampung deret Petogogan. Setelah dana dicairkan seluruh rumah kumuh di 4 RT tersebut dibongkar dan dibangun kembali oleh Puslitbang yang ada di Bandung menggunakan sistem Risha. Dalam proses pembangunan, seluruh warga di kampung deret Petogogan dipindahkan, ada yang mengontrak rumah, ada juga yang menumpang di rumah sanak saudaranya. Meskipun yang

membangun adalah Puslitbang Bandung namun, dalam proses pembangunan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan warga tetap melakukan pengawasan, bahkan sesekali mereka ikut membantu agar proses pembangunan bisa lebih cepat selesai.

### **3.2.2 Anggaran Pembiayaan Pembangunan Kampung Deret Petogogan.**

Dalam undang-undang nomor 64 tahun 2013, berkaitan dengan masalah pendanaan tercantum pada bagian 3 pasal 10 dan pasal 11. Disebutkan bahwa pendanaan kebijakan kampung deret berasal dari bantuan sosial (Bansos) yang dianggarkan oleh kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah dihitung berdasarkan luas rumah penerima bantuan maksimal 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh meter persegi) dengan harga permeter persegi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana maksimal yang diterima oleh warga sebesar RP. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah). Dana tersebut diberikan dalam 3 tahap yaitu 40%, 40% dan 20% untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana oleh warga.

### **3.2.3 Sosialisasi Kampung Deret Petogogan oleh Instansi Pemerintah kepada Masyarakat**

Sosialisasi mengenai kampung deret sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta sejak kebijakan kampung deret di mulai. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Perumahan dan gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dibantu Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Jakarta Selatan, dan walikota Jakarta Selatan beserta jajarannya. Bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan cara memaparkan maksud dan tujuan dari pembangunan kampung deret hingga diskusi antara dinas dan warga.

Mengajak sekelompok orang untuk mau mengikuti keinginan dari pemerintah bukan hal yang mudah, semuanya butuh proses apalagi mengenai orang banyak. Hal tersebut tentu berbeda dengan membangun sebuah rumah yang dapat disebut sesuai dengan waktu yang diinginkan. Oleh karena itu tim dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta beserta SKPD terkait melakukan sosialisasi tidak hanya dengan omongan tapi juga dengan gambar desain bangunan.

Sosialisasi yang memakan waktu lama ini akhirnya menemukan titik terang. Segala usaha dan upaya dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta bersama SKPD lainnya untuk meyakinkan warga akhirnya membuahkan

hasil. Setelah berkali-kali melakukan sosialisasi dan mencoba segala metode pendekatan, seluruh warga di kampung deret Petogogan akhirnya menyetujui untuk dilakukan penataan kampung melalui kampung deret.

#### **3.2.4 Manfaat Pembangunan Kampung Deret Petogogan**

Pembangunan kampung deret terbukti dapat mengubah kawasan yang tadinya kumuh, pencahayaannya kurang, penghawaannya kurang, penataan rumah yang tidak rapi, dan lain sebagainya menjadi kawasan yang tidak kumuh, lebih sehat karena penghawaan dan pencahayaannya cukup serta penataan rumah yang lebih rapi. Hal ini juga dirasakan oleh warga kampung deret Petogogan, mereka merasa lingkungannya sekarang menjadi lebih rapi dan lebih sehat dari sebelumnya. Selain itu warga juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupannya yang sebelumnya tidak ada seperti halnya kamar mandi atau wc pribadi, taman bermain, drainase, jalan yang lebih rapi dan lebar, dan lain sebagainya.

Selain perubahan kondisi fisik, Ibu mimin juga merasakan ketenangan mengingat kepadatan penduduk juga diatasi oleh pemerintah. Sebelumnya banyak penduduk yang menempati kontrakan kecil, setelah dibangun kampung deret yang mendapatkan rumah disana hanyalah penduduk asli. Tingkat



kebisingan dan orang lalu lalang juga berkurang, jadi mereka lebih merasa nyaman dan aman.

Secara fisik, keamanan dan kenyamanan memang dirasakan manfaatnya secara langsung. Namun secara mental nyatanya belum bisa dianggap berhasil. Kampung deret terkenal dengan salah satu program dari revolusi mental yang digadagadag oleh Gubernur Joko Widodo pada saat itu. Pembangunan kampung deret diharapkan dapat mengubah mental dari warga di kawasan kumuh yang tadinya minder dengan keadaan menjadi lebih percaya diri sehingga bisa merubah kehidupannya secara sosial dan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

### **3.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung Deret**

Pada Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2013 tentang bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui penataan kampung pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan kampung deret adalah meningkatkan peran serta dan tanggung jawab individu, keluarga dan/atau masyarakat dalam upaya penataan permukiman kumuh sehingga dapat terwujud permukiman yang layak huni. Pelibatan warga diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata sesuai dengan keinginan dari pemerintah dan warga kampung deret Petogogan. Pelibatan warga dalam implementasi kebijakan kampung deret di Petogogan dimulai dari perencanaan bersama Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, pengambilan dana, penggunaan dana (pembangunan), hingga perawatan lingkungan pasca pembangunan.

Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat kampung deret pada saat perencanaan lebih kepada partisipasi dalam keikutsertaan sosialisasi dan dalam bentuk pemikiran. Pada saat sosialisasi, partisipasi warga sangat baik. Hal ini dilihat dari banyaknya warga yang datang saat sosialisasi. Meskipun saat awal-awal sosialisasi masyarakat banyak yang tidak setuju, tapi mereka menunjukkan sikap keingintahuan mengenai kebijakan kampung deret. Bahkan pada saat Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta memberikan gambaran atau *site plan* dari pembangunan kampung deret, mereka pro aktif dalam memberikan masukan-masukan, karena banyak pada proses perencanaan banyak hal-hal yang harus dibentuk dan difikirkan secara matang. Pada saat perencanaan juga dibentuk kelompok masyarakat atau biasa dikenal dengan Pokmas. Pokmas ini merupakan kelompok yang menjembatani antara pemerintah dan warga. Pokmas dibentuk atas dasar kesadaran warga tanpa adanya campur tangan dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

pada saat inilah Pokmas mewakili warga di kampung deret dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan Nantinya pokmas yang akan memberikan informasi seputar pembangunan kepada warga di kampung deret apabila terjadi masalah atau sekedar memberikan informasi perkembangan pembangunan. Meskipun ada

Pokmas, tapi warga tetap melakukan pengawasan meskipun tidak setiap harinya mereka datang ke lokasi pembangunan. Warga datang ke lokasi dengan inisiatifnya sendiri tanpa disuruh oleh anggota Pokmas. selain melakukan pengawasan, warga juga ikut berpartisipasi dalam membangun rumah mereka.

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran dan tenaga, masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk materil. partisipasi dalam bentuk materil dilakukan oleh warga dengan menggunakan materil/uang yang mereka miliki untuk membangun atau mempercantik kondisi rumah mereka. Namun tidak semua warga dapat menyisihkan uang mereka untuk merapihkan rumahnya. Karena pada dasarnya kondisi ekonomi rumah tangga di kampung deret Petogogan rata-rata berada di golongan menengah kebawah.

Setelah pembangunan berhasil artinya tugas dari Dinas perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta telah selesai maka warga berinisiatif untuk membuat paguyuban kampung deret. Paguyuban kampung deret dibuat bertujuan untuk menjaga kampung deret agar tidak kembali kumuh dan menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang ingin melakukan penelitian atau sekedar berkunjung untuk melihat-lihat kampung deret.

#### 4. Kesimpulan

Implementasi memiliki arti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijaksanaan sampai hasil kebijaksanaan. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Berangkat dari adanya sebuah kebijakan, kemudian direncanakan agar tercapai tujuan dan sasarannya, hasil dari kebijakan dan perencanaan kemudian disosialisasikan ke kelompok sasaran. Untuk mencapai tujuan maka suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan. Kebijakan kampung deret dibuat oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, namun pada pelaksanaannya dimulai dari perencanaan hingga pengimplementasian dilaksanakan bersama oleh warga yang tinggal di lokasi pembangunan kampung deret. Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Kebijakan kampung deret yang diatur dalam dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 64 tahun 2013 sudah berjalan dengan baik meskipun pada saat itu belum dibuat Pergub yang mengatur tentang implementasi kebijakan kampung deret.
2. Pada saat sosialisasi berlangsung cukup lama dalam meyakinkan masyarakat, meskipun sudah dilakukan berbagai cara mulai dari penjelasan baik secara verbal maupun menggunakan *site plan* hingga proses diskusi.
3. Pelibatan warga dalam implementasi kebijakan kampung deret di Petogogan dimulai dari perencanaan bersama Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta, penggunaan dana (pembangunan), hingga perawatan lingkungan pasca pembangunan. Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat kampung deret pada saat perencanaan lebih kepada partisipasi dalam keikutsertaan sosialisasi dan dalam bentuk pemikiran. Bentuk partisipasi warga pada saat pelaksanaan adalah dalam mengawasi berjalannya pembangunan dan ikut serta dalam membangun rumah mereka. selain itu mereka juga bersedia mengeluarkan dana tambahan untuk menyempurnakan rumah mereka. Bentuk partisipasi pasca pembangunan kampung deret lebih kepada bagaimana warga menjaga lingkungan mereka agar tidak kembali kumuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan (dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisy*. Yogyakarta: Gava Media
- Iskandar.2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi kebijakan publik (konsep dan implikasinya di Indonesia)*.Yogyakarta:Gava Media
- Purwo, Santoso. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: research center for politics and government, UGM
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Riduwan. 2014. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta
- Rukminto Adi, Isbandi. 2007. *perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*.Depok: Fisip UI Press
- Sastropetro, Santoso. 1998. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan disiplin dalam pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *“Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI,
- Winarno, Budi. 2002. *“Apakah Kebijakan Publik?” dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (teori, Proses dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS

### Internet:

- <http://Jakarta.bps.go.id/index>, Di akses pada tanggal 30 Oktober 2014.
- <http://pustaka.pu.go.id/new/artikel-detail.asp?id=291>, Di akses pada tanggal 04 Agustus 2015.
- <http://megapolitan.kompas.com>, Di akses pada Tanggal 1 Maret 2016.
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/17/19205241/Anggota.DPRD.DKI.Beberkan.Penyebab.Warga.Enggan.Dipindahkan.ke.Rusun>, Di akses pada tanggal 2 September 2015.

*<http://metro.kompasiana.com/2013/10/10/pemprov-dki-Jakarta-mensosialisasikan-kampung-deret-600155.html>, Di akses pada tanggal 30 oktober 2014.*

*<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/02/26/n1lpkt-70-kampung-deret-dibangun-serentak-juni>, Di akses pada tanggal 02 September 2015.*

*<http://metro.news.viva.co.id/news/read/493988-petogogan--jadi-contoh-kampung-deret-di-jakarta>, Di akses pada tanggal 14 Januari 2016.*

*<https://www.youtube.com/watch?v=hWTBKADc4p4>, Di akses pada tanggal 1 Maret 2016*

*<https://www.youtube.com/watch?v=hWTBKADc4p4>, Di akses pada tanggal 1 Maret 2016*